

# PENDIDIKAN PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA

*by* Bernardus Sentot Wijanarka

---

**Submission date:** 19-Oct-2018 08:45AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1022691974

**File name:** PROCEEDING\_SNPV\_2013\_SW1.pdf (10.61M)

**Word count:** 4137

**Character count:** 27106

## PENDIDIKAN PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA

**Bernardus Sentot V<sup>17</sup>anarka**

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin,

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telp (0274) 520327

Email: [bsentot@gmail.com](mailto:bsentot@gmail.com)

### Abstrak

*Pendidikan kejuruan dan pendidikan guru kejuruan menghadapi beberapa masalah antara lain: sistem pendidikan, penerapan kurikulum baru, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), relevansi, efisiensi internal dan eksternal, mutu lulusan, ketersediaan guru kejuruan setiap kompetensi keahlian, pemerataan guru, dan pendidikan profesi guru. Karena banyaknya masalah yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan di Indonesia, maka dalam makalah ini dibahas mengenai pendidikan profesi guru SMK di Indonesia. Kekurangan guru SMK sedang diusahakan untuk dipecahkan dengan menyelenggarakan rintisan program PPG yaitu program PPGT Kolaboratif dan PPGT. Program PPG diharapkan mampu memenuhi kebutuhan guru pada semua bidang keahlian sesuai spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. PPG prajabatan dalam Permendikbud No 87 tahun 2003 belum secara khusus mengatur mengenai PPG untuk guru SMK yang seharusnya memiliki karakteristik berbeda dengan PPG untuk guru mata pelajaran normatif. PPG prajabatan tersebut perlu dianalisis dalam rangka mengembangkan model program PPG untuk guru SMK di Indonesia.*

**Kata kunci:** kejuruan, SMK, PPG

### Pendahuluan

Pendidikan guru kejuruan (*vocational teacher education*) sampai saat ini masih menjadi bahan diskusi di beberapa konferensi di seluruh dunia. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Lipsmeier dalam GIZ (2013) : “*when TVET teacher training is the subject of discussions at any conference around the world, no much time elapses before it becomes patently clear, that there are many unresolved issues to do with this sector of the educational system*”. Masalah yang sulit dipecahkan antara lain adalah kurikulum untuk pendidikan guru kejuruan. Kurikulum untuk pendidikan guru kejuruan sangat sulit untuk direncanakan menjadi kurikulum yang terstandar atau homogen yang bisa digunakan oleh para dosen di perguruan tinggi dan siap dipelajari oleh para mahasiswa.

Masalah penyiapan guru kejuruan dan pendidikan kejuruan juga menjadi pokok diskusi, seminar, penelitian dan konferensi yang diadakan oleh *Regional Cooperation Platform* (RCP). RCP adalah kerjasama antara lembaga pendidikan kejuruan dan lembaga pendidikan guru kejuruan di Asia Timur, Asia Tenggara, dan China yang diprakarsai oleh GIZ Jerman didukung oleh beberapa perguruan tinggi di negara Jerman. Perbedaan sistem pendidikan di negara-negara Asia menyebabkan beberapa penelitian mengenai pendidikan kejuruan dan pendidikan guru kejuruan dilakukan bekerjasama antar beberapa negara anggota. Tujuan penelitian terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan pendidikan guru kejuruan di regional Asia dan China. Model pendidikan kejuruan di beberapa negara juga menjadi bahasan yang serius oleh beberapa negara

anggota RCP. Pendidikan guru kejuruan di beberapa negara di Asia menggunakan sistem atau model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Masalah mengenai pendidikan guru kejuruan dialami oleh beberapa negara, misalnya Vietnam, Malaysia dan Indonesia. Guru di pendidikan kejuruan di Vietnam mengalami masalah pada kualitas guru, terutama dalam pengetahuan ilmu pendidikan dan metode mengajar kejuruan. Guru pendidikan kejuruan di Vietnam memiliki karakteristik : 59 % berasal dari universitas teknik, 16 % dari universitas kependidikan, 10 % *technical experts*, dan 15 % pekerja terampil dan *craftmen* lulusan lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki pengalaman kerja di industri, perusahaan dan mengajar di lembaga pendidikan kejuruan (Tran Duc Inh, 2013). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa 84 % guru kejuruan tidak memiliki keterampilan dalam mengajar dan pengetahuan mengenai ilmu pendidikan kejuruan.

Permasalahan pendidikan guru kejuruan dialami juga oleh negara Malaysia. Pemerintah Malaysia pada saat ini mensyaratkan agar semua guru sekolah menengah memiliki gelar sarjana. Kebijakan tersebut menyebabkan guru-guru sekolah kejuruan yang memiliki ijazah diploma banyak yang studi lanjut ke universitas umum (Noor Lisa, 2013). Selain tuntutan tersebut, bagi guru kejuruan diharuskan memiliki *Malaysian Skills Certificate Level 3 (Supervisory Level)*. Hal tersebut dirugikan karena para siswa lulusan sekolah kejuruan diharapkan memiliki *Malaysian Skills certificate Level 2 (Operation and Production Level)*.

Pendidikan kejuruan dan pendidikan guru kejuruan di Indonesia memiliki masalah yang hampir sama atau bahkan lebih kompleks dari pada masalah internasional dan regional tersebut di atas. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan: sistem pendidikan, penerapan kurikulum baru 2013, pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ketersediaan guru kejuruan bidang studi langka (tidak ada LPTK yang menyelenggarakan program keahlian tersebut), pemerataan guru di seluruh daerah Indonesia, dan pendidikan profesi guru kejuruan. Karena banyaknya masalah yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan di Indonesia, maka dalam makalah ini dibatasi pada pembahasan mengenai pendidikan guru kejuruan, khususnya pendidikan profesi guru untuk SMK di Indonesia.

### Sistem Pendidikan Nasional

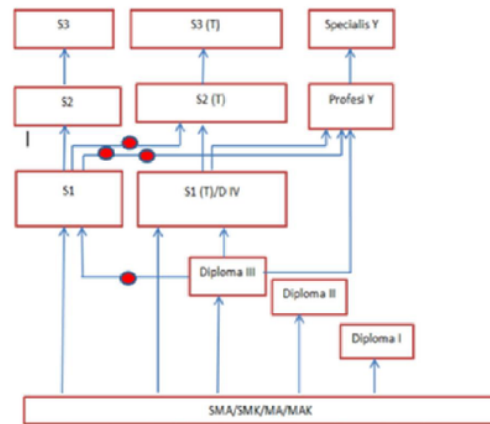
Penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Sistem pendidikan nasional mengatur mengenai semua komponen pendidikan yang harus dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Pada bab VI UUSPN telah diatur mengenai jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Menindaklanjuti UUSPN tersebut banyak UU dan peraturan menteri yang mendukung keterlaksanaan sistem pendidikan nasional. Peraturan yang mendukung mengenai proses pendidikan, guru dan pendidikan tinggi antara lain :

peraturan menteri mengenai Standar Pendidikan Nasional (UU No. 19 tahun 2005 dan PP No. 32 tahun 2013), beberapa peraturan menteri mengenai komponen standar pendidikan nasional, Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), Permendiknas No. 16 tahun 2007 mengenai standar kualifikasi dan kompetensi guru, dan UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Beberapa UU dan peraturan tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan, walaupun beberapa masih belum bisa terlaksana sepenuhnya, misalnya tentang guru dan dosen dan pendidikan tinggi.

UU no 12 tahun 2012 disusun untuk melengkapi peraturan mengenai pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai UUSPN. Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya. Institusi Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang diselenggarakan, yaitu: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Gambaran sistem pendidikan tinggi di Indonesia adalah seperti Gambar 1.

Berdasarkan sistem pendidikan tinggi tersebut dapat diidentifikasi posisi pendidikan profesi guru. Menurut UUGD syarat untuk menjadi guru adalah minimal memiliki ijazah S1 atau DIV dan memiliki sertifikat profesi guru. Berdasarkan peraturan tersebut maka proses pendidikan akademik (S1 atau DIV) calon guru kejuruan, dan pendidikan profesi guru diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan Gambar 1 tersebut terlihat bahwa untuk pendidikan profesi bisa ditempuh oleh lulusan pendidikan akademik maupun lulusan pendidikan vokasi.



Gambar 1. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia (Dirjen Dikti 2011)

### Sertifikasi guru

Setelah UUGD diberlakukan, Kementerian pendidikan nasional melaksanakan sertifikasi guru untuk semua jenjang pendidikan. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu: portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), dan Pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan. Semua langkah tersebut dilaksanakan agar proses sertifikasi bagi guru dapat diselesaikan pada tahun 2015. Sampai dengan saat ini belum semua guru yang mengajar di sekolah tersertifikasi, karena ada sebagian guru yang belum memiliki ijazah S1 atau DIV,



pengalaman mengajar belum mencukupi, beban mengajar sedikit, tidak/belum lulus PLPG, dan status kepegawaian sebagai guru tidak tetap jelas.

Sertifikasi guru melalui portofolio menggunakan prinsip RPE (*Recognition of prior experience*) dan RPL (*Recognition of prior learning*), sehingga bagi guru senior yang telah memiliki ijazah S1, DIV atau S2 sebagian besar menempuh prosedur portofolio. PLPG dilaksanakan dalam rangka sertifikasi guru melalui pendidikan dan latihan selama 9 hari. Para peserta PLPG sebagian adalah mereka yang gagal atau tidak lolos jalur portofolio dan mereka yang belum memenuhi syarat untuk itu. PPG dalam jabatan untuk guru sekolah menengahkejuruan sampai saat ini belum dilaksanakan. PPG dalam jabatan lebih berat pelaksanaannya dari pada kedua prosedur sebelumnya, karena para peserta harus mengikuti program tersebut selama satu tahun. Satu atau dua tahun lagi sertifikasi guru melalui portofolio, PLPG, dan PPG dalam jabatan kemungkinan besar sudah tidak akan ada lagi dan sebagai gantinya akan dilaksanakan PPG pra jabatan.

35

#### Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan

PPG pra jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 8 Tahun 2009 tentang Program PPG dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2013. Definisi mengenai pendidikan profesi dan PPG dijabarkan dalam Permendikbud No. 87 tahun 2013 tentang PPG pra jabatan tersebut. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program PPG pra jabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/DIV nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Isu mengenai *supply* dan *demand* tenaga guru keduanya sangat kompleks dan berdimensi banyak. Hal tersebut meliputi: bagaimana mengembangkan kualifikasi guru yang sudah ada, bagaimana memenuhi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, bagaimana merekrut guru untuk lokasi yang memang betul-betul membutuhkan, bagaimana distribusi guru dengan jalan yang adil dan efisien, dan bagaimana menjaga kualitas guru secara berkelanjutan (GIZ, 2013). Semua masalah tersebut terjadi di hampir semua negara terutama negara yang sedang berkembang, memiliki wilayah luas dan penduduknya relatif banyak.

Model pendidikan guru kejuruan ada lima macam (GIZ, 2013). Pertama, model *concurrent* atau *integrative model*. Beberapa pemangku kepentingan memiliki konsensus umum bahwa model ini lebih disukai, karena mahasiswa yang mendaftar pada program studi ini memang akan menjadi guru kejuruan. Model kedua adalah model *consecutive*, yaitu memperoleh kualifikasi sebagai guru setelah lulus dari universitas (sarjana atau magister). Pelaksanaan pendidikan guru meliputi pendidikan kejuruan, keterampilan kejuruan baik sebelum menjadi guru atau sudah menjadi guru. Pendidikan dilakukan secara klasikal atau melalui pendidikan jarak jauh. Model ketiga adalah perekrutan para praktisi dari dunia kerja. Keempat rekrutmen praktisi yang memiliki gelar sarjana. Model yang kelima adalah rekrutmen pekerja ahli (*real practical practitioners*). Pada saat ini dari kelima model tersebut, Indonesia menerapkan model yang pertama, yaitu

model *concurrent*. Setelah UUGD disahkan dan PPG dilaksanakan, maka model pertama dan model kedua diterapkan di Indonesia. Model perekrutan praktisi saat ini jarang dilaksanakanooleh SMK di Indonesia.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan mulai tahun 2011 menyelenggarakan PPG untuk guru kejuruan. Program PPG tersebut merupakan program rintisan yang terdiri dari PPG Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif) dan PPG Terintegrasi dengan kewenangan tambahan (PPGT). Kedua macam rintisan PPG tersebut mengikuti model *consecutive* dan model *concurrent*. Program PPGT kolaboratif mendidik lulusan DIV selama satu tahun dengan keterampilan mengajar dan ilmu pendidikan kejuruan, sedangkan PPGT mendidik lulusan SMA/SMK menjadi guru kejuruan dengan mengintegrasikan pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu kurikulum dengan lama studi lima tahun.

#### PPGT Kolaboratif

Berdasarkan <sup>6</sup> surat keputusan Dirjen Mandikdasmen, No.251/c/Kep/MM/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, terdapat tidak kurang dari 121 jenis kompetensi keahlian yang dipelajari di jenjang pendidikan menengah kejuruan. Banyaknya kompetensi keahlian tersebut ternyata tidak seimbang dengan jumlah kompetensi keahlian yang diselenggarakan oleh LPTK di seluruh Indonesia. Banyak bidang keahlian yang belum tersedia guru produktifnya karena LPTK hanya menyelenggarakan 28 program studi yang sesuai dengan spektrum tersebut. Berdasarkan data direktorat pendidikan <sup>27</sup> inggi, masih dibutuhkan guru adaptif sejumlah 5.980 guru, guru produktif sebanyak 18.165 orang guru. Gambaran kekurangan guru kedua macam kelompok mata pelajaran tersebut tidak terjadi pada guru mata pelajaran normatif yang kelebihan guru sejumlah 16.046 orang (<http://majubersama.dikti.go.id>).

PPG Kolaboratif diharapkan dapat mengatasi kesenjangan kebutuhan dan pendidikan guru kejuruan. Kolaborasi antara LPTK dengan Politeknik yang memiliki bidang keahlian yang belum diselenggarakan di LPTK dapat menghasilkan guru SMK yang berkualitas. Rekapitulasi LPTK dan politeknik yang menyelenggarakan rintisan PPG Kolaboratif dapat dilihat pada Tabel 1.

Masalah distribusi guru dan tersedianya guru yang memiliki kompetensi kejuruan dan profesional pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) diatasi oleh <sup>5</sup> ementerian pendidikan dan kebudayaan dengan menyelenggarakan PPGT. Peserta Program Rintisan PPGT diprioritaskan berasal dari daerah yang memiliki latar belakang katagori 3T tersebut dan memiliki kualifikasi akademik minimal lulus Sekolah Lanjutan Atas (SMA/MA/SMK) dari satuan pendidikan yang terakreditasi. Program Rintisan PPGT adalah program PPG yang mengintegrasikan program studi substansi akademik dengan program studi kependidikan. Program kependidikan dilaksanakan dengan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang intensif di sekolah mitra. Pada akhir program pendidikan diadakan uji kompetensi untuk memperoleh kewenangan tambahan (<http://majubersama.dikti.go.id>). Rekap asal peserta dan LPTK penyelenggara dapat dilihat di Tabel 2.

**Tabel 1.** Rekapitulasi program studi dan PT penyelenggara PPGT Kolaboratif

Jurusan/Prodi D4	PT Penyelenggara		Jumlah
	D4	PPG	
Teknik Produksi Benih	Politeknik Negeri Jember	Universitas Negeri Malang	20
Manajemen Bisnis Unggas	Politeknik Negeri Jember	Universitas Negeri Malang	10
Manajemen Pertanian Lahan Kering	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Universitas Negeri Yogyakarta	30
Manajemen Produksi Pertanian	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Universitas Negeri Padang	30
Budidaya Tanaman Perkebunan	Politeknik Negeri Lampung	Universitas Negeri Jakarta	30

**Tabel 2.** Rekap peserta PPGT Tahun 2012

No	Propinsi	Aceh	Kalbar	Kaltim	Kepri	Maluku	NTT	Papua	Papua Barat	Sulut
1	Universitas Negeri Padang	54	0	0	0	0	6	5	1	5
2	Universitas Negeri Jakarta	24	8	1	1	1	1	0	0	0
3	Universitas Pendidikan Indonesia	9	0	0	0	0	27	0	0	0
4	Universitas Negeri Semarang	2	0	4	1	0	7	22	0	0
5	Universitas Negeri Yogyakarta	25	0	4	1	1	30	6	2	2
6	Universitas Negeri Surabaya	26	0	2	0	1	37	3	0	1
7	Universitas Negeri Makassar	10	0	6	0	7	37	7	2	3
8	Universitas Negeri Manado	0	0	0	0	0	0	6	14	16
9	Universitas Bengkulu	15	0	0	0	0	20	1	0	0
10	Universitas Sanata Dharma	0	0	0	0	0	34	2	0	0

Kewenangan tambahan yang dimaksud dalam PPGT adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang terdiri dari kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Guru SMK kewenangan utamanya adalah sebagai guru pada mata pelajaran produktif (mata pelajaran yang berisikan kompetensi keahlian yang menuntut konsep relevansi dengan dunia industri) dengan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan (mata pelajaran yang berfungsi menyiapkan kemampuan dasar yang memiliki daya transfer terhadap mata pelajaran keahlian).

26

#### PPG Pra Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 87 Tahun 2013

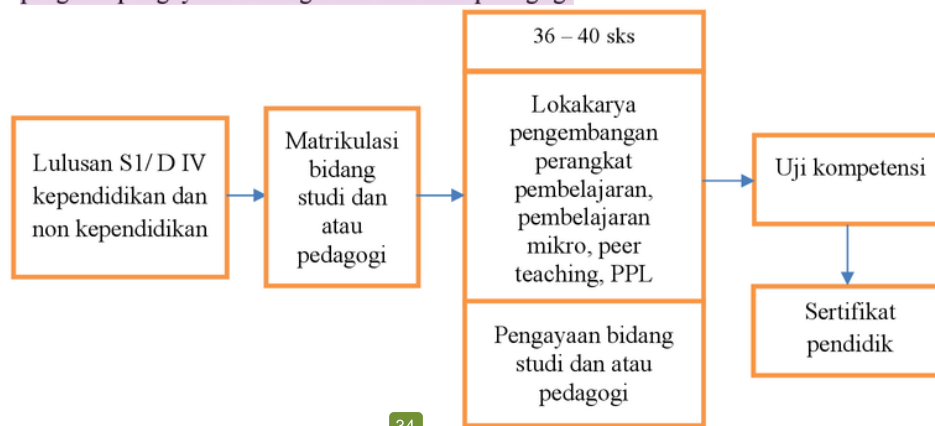
Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 87 tahun 2013, pada prinsipnya PPG pra jabatan merupakan penugasan dari Direktorat pendidikan tinggi dan LPTK adalah sebagai penyelenggaranya. LPTK diharapkan mengembangkan kurikulum PPG pra jabatan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan pada peraturan menteri tersebut. Berdasarkan ketentuan dan panduan pada peraturan menteri tersebut, maka dapat digambarkan model pembelajaran PPG yang dimaksud. Model pembelajaran ini mengatur mengenai *input* (peserta), proses (kurikulum, sistem pembelajaran), dan *output*.

Program PPG pra jabatan dapat diikuti oleh semua lulusan program S1 atau DIV yang memiliki bakat dan minat menjadi guru. Peserta program PPG



adalah: (1) lulusan S1 kependidikan yang program studinya sesuai, (2) lulusan S1 kependidikan yang program studinya serumpun, (3) lulusan S1 / DIV non kependidikan yang program studinya sesuai, dan (4) lulusan S1/ DIV yang program studinya serumpun. Dengan demikian semua lulusan S1 dan DIV yang bidang studinya sesuai atau serumpun dapat mengikuti program PPG pra jabatan. Perbedaan pelaksanaan proses pendidikan adalah pada matrikulasi dan pengayaan.

Proses pendidikan PPG pra jabatan menurut peraturan tersebut di atas dilaksanakan secara tatap muka dan magang (Gambar 2). Tatap muka dilakukan untuk kuliah matrikulasi, pengayaan bidang studi, dan pengayaan bidang pendidikan. Magang dilaksanakan untuk program pengalaman lapangan (PPL). Struktur kurikulum program PPG berisi : lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat (*peer teaching*), Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi dan/atau pedagogi.



**Gambar 2.** Model PPG untuk lulusan S1/ DIV kependidikan dan non kependidikan yang memiliki bidang keahlian sesuai/serumpun dengan mata pelajaran yang akan diampu

PPG pra jabatan untuk guru SMK diharapkan luarannya adalah sertifikat pendidik untuk mata pelajaran produktif dan adaptif. Sertifikat tersebut diperoleh setelah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK bekerjasama dengan organisasi profesi. Dengan demikian untuk masa yang akan datang mereka yang berhak menjadi guru adalah yang memiliki sertifikat pendidik melalui program PPG. Pada peraturan ini belum diatur masa berlaku untuk sertifikat pendidik yang diperoleh, sehingga dapat dikatakan sertifikat pendidik berlaku selama menjadi guru.

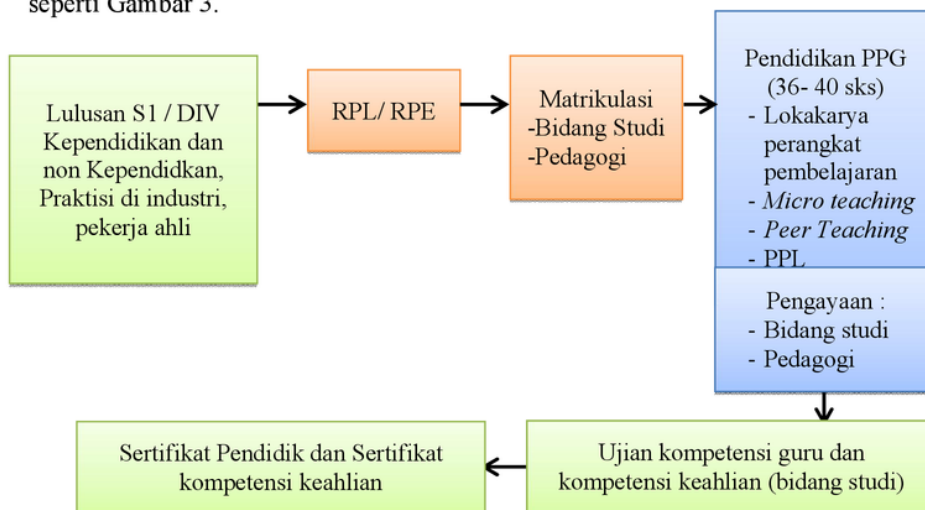
Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) program PPG pra jabatan lebih diperuntukkan untuk lulusan baru atau guru baru, karena guru yang saat ini mengajar di sekolah sudah memiliki sertifikat pendidik melalui portofolio dan PLPG; (2) semua lulusan S1 dan DIV yang memenuhi syarat diperbolehkan mengikuti program PPG; (3) batasan bidang keahlian peserta adalah sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampu atau serumpun; dan (4) tidak ada pengakuan pengalaman bekerja di industri atau pengalaman mengajar (RPE) seperti pada sertifikasi melalui portofolio maupun PLPG. Berdasarkan paparan tersebut, maka LPTK diharapkan mengantisipasi pemberlakuan



peratutran PPG pra jabatan ini, karena terdapat *overlapping* mata kuliah antara program S1 kependidikan dan program PPG pra jabatan.

#### Usulan PPG Paruh Waktu untuk Guru Sekolah Kejuruan

Guru SMK memiliki karakteristik yang berbeda dengan guru sekolah umum (guru mata pelajaran normatif). Pendidikan guru kejuruan terutama bertujuan untuk mendidik calon guru mata pelajaran produktif dan adaptif. Model pembelajaran PPG tersebut di atas apabila diterapkan untuk guru SMK masih terdapat banyak kekurangan, karena belum mengakomodasi karakteristik pembelajaran kejuruan. Penyesuaian model PPG dapat dilakukan berdasarkan *input*, proses dan *output*. Dari sisi input terutama harus mengakomodasi masuknya praktisi dari industri dan pekerja ahli. Dari sisi proses dengan menerapkan RPE dan RPL. *Output* PPG tidak hanya sertifikat guru, akan tetapi juga sertifikat kompetensi keahlian. Gambaran PPG untuk guru SMK yang diusulkan adalah seperti Gambar 3.



**Gambar 3.** Model pembelajaran PPG pra jabatan paruh waktu untuk guru SMK yang diusulkan

Struktur kurikulum PPG untuk guru kejuruan tersebut masih mengakomodasi peraturan yang berlaku, akan tetapi metode penyampaiannya ditambah dengan menerapkan *blended learning*. Selain dari itu prosedur RPL dan RPL diterapkan sesuai dengan prinsip asesmen kompetensi atau asesmen profesi. Gambaran struktur kurikulum dan sistem pembelajaran/metode pembelajaran adalah sebagai berikut.

#### Struktur Kurikulum

##### Semester I

- 1) Lokakarya perangkat pembelajaran (12 sks)
- 2) *Micro teaching* (3 sks)
- 3) *Peer Teaching* (3 sks)
- 4) Pengayaan Bidang studi (6 sks – 12 sks)
- 5) Pengayaan Pedagogi (6 sks – 12 sks)

Semester II

PPL

(6 sks)

**Sistem Pembelajaran/ Metode Pembelajaran**

PPG dapat menggunakan berbagai strategi/ metode pembelajaran (*blended learning*), yaitu :

- 1) RPL/ RPE dengan menggunakan portofolio
- 2) Matrikulasi
  - a. Mata kuliah teori dengan menggunakan modul dan atau *e-learning*
  - b. Praktik dengan kuliah praktikum di laboratorium/bengkel/ di Industri
- 3) Lokakarya/ *workshop*
- 4) *Micro teaching* dan *peer teaching* dengan metode praktikum
- 5) Pengayaan dengan menggunakan *e-learning*, modul, atau praktikum di lab/ bengkel/ di industri
- 6) PPL dengan kuliah lapangan dan pembimbingan oleh dosen dan guru yang memiliki sertifikat pendidik.

Uji kompetensi dilaksanakan dengan bekerjasama antara LPTK, asosiasi profesi, dan Lembaga sertifikasi profesi Badan Nasional sertifikasi profesi (BNSP). Dengan menerapkan model PPG paruh waktu tersebut diharapkan proses pendidikan guru SMK yang memiliki kompetensi pendidik, sekaligus kompetensi keahlian dapat terwujud.

**Komparasi Empat Macam PPG untuk Guru SMK**

Bertolak dari deskripsi dan data-data di atas mengenai empat macam program PPG, maka dapat dianalisis komponen-komponennya kemudian diadakan komparasi. Bertolak dari komparasi komponen PPG dapat dilihat kekurangan dan keunggulan untuk masing-masing program PPG yang telah ada (PPGT Kolaboratif dan PPGT) atau yang akan dilaksanakan sesuai peraturan PPG pra jabatan dan PPG paruh waktu. Komponen- komponen yang dibandingkan adalah: calon peserta, RPE, RPL, ijazah, matrikulasi, lama studi, jumlah sks, metode pembelajaran, uji kompetensi, dan sumber dana. Tabel analisis komponen program PPG tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

**Tabel 3.** Analisis komponen empat program PPG (*bagian 1*)

Komponen	PPGT Kolaboratif (Pilot project)	PPGT (Pilot project)	PPG Pra jabatan Permen No. 87 of 2013	PPG paruh waktu ( <i>extra-occupation</i> )
Peserta dari kalangan praktisi, ahli, pekerja ahli	tidak	tidak	Kemungkinan ada	Ada
RPE	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Diatur dengan prosedur RPE
RPL	D IV harus sesuai/serumpun	Tidak disyaratkan	Asal program studi sesuai / serumpun	Program study linier/ serumpun
Matrikulasi	Wajib : bidang studi dan atau pedagogi	tidak	Wajib : bidang studi dan atau pedagogi	Tidak wajib tergantung hasil RPE/ RPL

**Tabel 4.** Analisis komponen empat program PPG (*bagian 2*)

Komponen	PPGT Kolaboratif (Pilot project)	PPGT (Pilot project)	PPG Pra jabatan Permen No. 87 of 14/2013	PPG paruh waktu ( <i>extra-occupation</i> )
Ijazah (minimum)	D IV	SMA/SMK/MAK	S1 / D IV kependidikan dan non kependidikan	S1 / D IV kependidikan dan non kependidikan
Lama studi	2 semester	10 semester	2 semester	2 semester
Jumlah sks	36 - 40	144 + 36	36 - 40	36 - 40
Metode pembelajaran	Tatap muka, magang	Tatap muka, magang	Tatap muka, magang	Tatap muka, modul, eLearning, magang ( <i>blended learning</i> )
3 Uji kompetensi	Uji kompetensi pendidik/ guru	Uji kompetensi pendidik/ guru	Uji kompetensi pendidik/ guru	Uji kompetensi pendidik/ guru Uji kompetensi keahlian
Pembiayaan	pemerintah	pemerintah	Peserta (belum diatur)	Peserta

38 Berdasarkan analisis pada Tabel 3 dan 4 di atas, dapat dibandingkan keunggulan dan kekurangan masing-masing program PPG. Keunggulan dan kekurangan tersebut tidak dapat disimpulkan secara obyektif, karena dapat dilihat dari banyak sudut pandang, yaitu: kebutuhan guru masing-masing kompetensi keahlian, kepentingan para peserta, ketersediaan kuota peserta PPG, sumber dana, dan kesiapan LPTK penyelenggara. Dilihat dari sudut pandang mempercepat ketersediaan guru pada bidang keahlian yang belum diselenggarakan oleh LPTK, maka program PPG paruh waktu dengan menerapkan *blended learning* akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih efisien.

### Simpulan

Kekurangan guru di SMK pada saat ini sedang diusahakan untuk dipecahkan dengan menyelenggarakan program PPGT Kolaboratif dan PPGT untuk calon guru SMK. Program PPG diharapkan mampu memenuhi kebutuhan guru pada semua bidang keahlian sesuai spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan. PPG pra jabatan yang telah diatur dalam Permendikbud No 87 tahun 2003 bisa dikembangkan menjadi program PPG paruh waktu untuk guru SMK dengan berbagai metode penyampaian (*blended learning*), sehingga pemenuhan kebutuhan guru kejuruan untuk semua kompetensi keahlian dapat diselenggarakan secara efisien.

### Rekomendasi

Berdasarkan kajian mengenai program PPG di atas, maka dikemukakan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. LPTK sebagai penyelenggara pendidikan S1 kependidikan diharapkan menyesuaikan kurikulum pendidikan S1 kependidikan agar tidak *overlapping* dengan kurikulum program PPG pra jabatan.
2. Penyelenggaraan program PPG pra jabatan untuk guru SMK hendaknya dapat menjangkau seluruh kompetensi keahlian sesuai spektrum keahlian pendidikan

kejuruan. Pendidikan profesi guru SMK hendaknya mengakomodasi bukan hanya lulusan baru, tetapi juga para praktisi dari industri, pekerja ahli yang akan berpindah profesi menjadi guru SMK dari seluruh pelosok tanah air Indonesia.

### 10 Daftar Pustaka

- Batista, M., Alvarez, M., Sanchez-Carrilero, M., et al. (31 Agustus 2009). CAL-CBT Based Virtual Learning and Training in Machining Engineering. A Case Study: CNC Lathe. *Material Science Forum*, 625, 19-28.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra jabatan.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra jabatan
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sains Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dey, I. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Sciences*. New York: Routledge.
- GIZ. (2013). Regional Conference on Vocational Teacher Education “Vocational Teacher Education and Research as a Regional Task and Challenge”. GIZ-CP : China.
- Indonesia. (2005). UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah Indonesia
- Indonesia. (2012). UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah Indonesia
- Johnson, S.D, at all. (2004). Internet-Based Learning in Postsecondary Career and Technical Education. *Journal of Vocational Education Research*, 29(2), pp. 101-119.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013-Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kyong-Jee Kim, Curtis J. Bonk, and Ya-Ting Teng. (2009). The present state and future trends of blended learning in workplace learning settings across five countries. *Asia Pacific Educ. Rev.* (2009) 10:299–308
- Lutz Goertz. (2010). E-Learning Made in Germany- Market and Trend. *ELBA Conference Rostock*, 1 July 2010
- Miles, M.B., & Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis (second Edition)*. California: Sage Publications



- Nor Lisa. S, dkk. (2013). *Evaluation on Curriculum for Further Training in Occupational Skills for Vocational Teachers in Metal Cutting Occupation*. Paper pada RCP Workshop di Haipong, Vietnam
- Seidel, J.V. (1998). *Qualitative Data Analysis*. Diambil pada tanggal 18 Juli 2011, dari <ftp://ftp.qualisresearch.com/pub/qda.pdf>
- Spadley, J.P. (2007). *Metode Etnografi*. (Terjemahan Elizabeth, M.Z). Yogyakarta: Tiara Wacana. (Buku asli diterbitkan tahun 1979).
- Tran Duc Inh.(2013). *Evaluation on Curriculum for Further Training in Occupational Skills for Vocational Teachers in Metal Cutting Occupation*. Paper pada RCP Workshop di Haipong, Vietnam

# PENDIDIKAN PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://gudangpendidikankita.blogspot.com">gudangpendidikankita.blogspot.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://www.dikti.go.id">www.dikti.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://muhamadalisaifudin.blogspot.com">muhamadalisaifudin.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://bachnghe.edu.vn">bachnghe.edu.vn</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://uny.ac.id">uny.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://seleksi.dikti.go.id">seleksi.dikti.go.id</a> Internet Source	1%
7	Submitted to University of Leicester Student Paper	1%
8	<a href="http://jurnal.upi.edu">jurnal.upi.edu</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a>	

Internet Source

1%

10

Kiritsis, Dimitris, Ahmed Bufardi, Dimitris Mavrikios, Thomas Knothe, Hadrien Szigeti, and Anirban Majumdar. "A competence-based industrial learning approach for factories of the future", Education and Information Technologies, 2013.

Publication

1%

11

[www.jdih-bjm.web.id](http://www.jdih-bjm.web.id)

Internet Source

1%

12

[maradana.wordpress.com](http://maradana.wordpress.com)

Internet Source

1%

13

[jurnaldikbud.kemdikbud.go.id](http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1%

14

[itjen.depdiknas.go.id](http://itjen.depdiknas.go.id)

Internet Source

<1%

15

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1%

16

[repository.unand.ac.id](http://repository.unand.ac.id)

Internet Source

<1%

17

Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

<1%

[ilmukitasurgakita.blogspot.com](http://ilmukitasurgakita.blogspot.com)

18

Internet Source

&lt;1%

19

[blog.uad.ac.id](http://blog.uad.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

20

Submitted to University College London

Student Paper

&lt;1%

21

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

&lt;1%

22

[etd.ohiolink.edu](http://etd.ohiolink.edu)

Internet Source

&lt;1%

23

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

&lt;1%

24

[www.zonalinenews.com](http://www.zonalinenews.com)

Internet Source

&lt;1%

25

[kclpure.kcl.ac.uk](http://kclpure.kcl.ac.uk)

Internet Source

&lt;1%

26

[seatrans.its.ac.id](http://seatrans.its.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

27

[repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

Internet Source

&lt;1%

28

[search.proquest.com](http://search.proquest.com)

Internet Source

&lt;1%

29

[snkpk.fkip.uns.ac.id](http://snkpk.fkip.uns.ac.id)

Internet Source

&lt;1%



---

30 [www.beritaekspres.com](http://www.beritaekspres.com) <1 %  
Internet Source

---

31 [stmikbumigora.ac.id](http://stmikbumigora.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

32 [dadangsyastieyasaanggana.ac.id](http://dadangsyastieyasaanggana.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

33 [magussudrajat.blogspot.com](http://magussudrajat.blogspot.com) <1 %  
Internet Source

---

34 [restysawir.blogspot.com](http://restysawir.blogspot.com) <1 %  
Internet Source

---

35 [www.fkip-uninus.ac.id](http://www.fkip-uninus.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

36 [www.dsd.gov.my](http://www.dsd.gov.my) <1 %  
Internet Source

---

37 [referensi.elsam.or.id](http://referensi.elsam.or.id) <1 %  
Internet Source

---

38 [id.scribd.com](http://id.scribd.com) <1 %  
Internet Source

---

39 [stttekstil.ac.id](http://stttekstil.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

40 [animarlina.wordpress.com](http://animarlina.wordpress.com) <1 %  
Internet Source

---

41 [rangkuman-q.blogspot.com](http://rangkuman-q.blogspot.com)



Internet Source

<1%

42

[www.umm.ac.id](http://www.umm.ac.id)

Internet Source

<1%

43

[fr.slideshare.net](http://fr.slideshare.net)

Internet Source

<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 8 words

Exclude bibliography  On